



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Palembang, Sumatera Selatan 30127,
Telp.(0711) 7443621, Fax. (0711) 7443621 Palembang 30127
Laman bpkad.sumselprov.go.id, Pos-el bpkad@sumselprov.go.id

NOTA DINAS

Yth : Kepala Bidang dan Kepala Subbagian/Subbidang di Lingkungan BPKAD
Provinsi Sumatera Selatan
Dari : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan
Nomor : 000.7/00785 /BPKAD-I/2026
Tanggal : 09 Februari 2026
Lampiran : 1 (satu) Laporan
Hal : Permintaan Laporan Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja per triwulan
Tahun 2026

Menindaklanjuti Hasil Rekomendasi SAKIP Tahun 2025 atas penerapan akuntabilitas kinerja, diminta kepada Saudara untuk membuat Laporan Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja guna mengetahui progres capaian dan mengoptimalkan Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang disampaikan setiap triwulan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Laporan tersebut disampaikan ke Bagian Perencanaan dan Data Informasi (sebagaimana format sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan,



Ferri Yahuar, S. KM., M. Kes
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 197607132009021002

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Terlaksananya Tata Kelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	- Persentase pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	24%	0,24		
		- Tingkat Implementasi E-Sakip Perangkat Daerah	%	100				Belum ada hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Tahun 2025

Palembang, 6 April 2026

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 198208162001121004

Sekretaris,

Ferri Yanuar, S.K.M., M.Kes.
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 197607132009021002

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Terlaksananya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian	- Persentase Terpenuhi nya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan	%	100	-	-	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target, berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan	Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Triwulan I telah memproses Cuti Pegawai, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat Serta Pensiun Pegawai
2	Terlaksananya Kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah	- Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Yang terpenuhi	%	100	-	-	RKBMD, KIB dan KIR pada Setiap Bidang Pengadaan Kendaraan Dinas dengan sistem sewa, Gedung Kantor dan Rumah Dinas, serta sarana dan Prasarana Gedung dan Rumah Dinas Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sebesar 33%, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sebesar 22% dan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Sebesar 1% Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sebesar 5,95 %, Logistik 38,97 %, Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 23,22%, Jasa Komunikasi Internet, Air dan Listrik Sebesar 13,73%	
		- Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	%	100	-	-		
		- Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diakukan Pemeliharaan	%	100	-	-		
3	Terlaksananya Kualitas Tata Kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase Terpenuhi nya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Baik	%	100	-	-		
4	Terlaksananya Kualitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kebutuhan Perangkat Daerah	- Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kebutuhan Perangkat Daerah	%	100	-	-		

Sekretaris Badan,


 Ferri Yanuak S.K.M..M.Kes
 Pembina Tk I (IV.b)
 NIP. 197607132009021002

Palembang, 6 April 2026
 Kasubdag Umum dan Kepegawaian

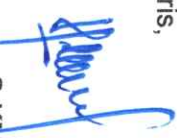

 Muhammad Tito S.H
 Penata Tk I (III.d)
 NIP. 198209172015021001

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2026

Sub Bagian Keuangan dan Aset (Bidang Sekretariat)

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai dengan peraturan	%	100	9.62	9.62	Belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target.	Sub Bagian Keuangan dan Aset sampai dengan Triwulan I telah menyelesaikan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Unaudited BPKAD Provinsi Sumatera Selatan selaku SKPD Tahun Anggaran 2025 dengan persentase capaian sebesar 9.62%.

Sekretaris,


Ferri Yanuar, S.KM., M.Kes.
Pembina Tk I (IV.b)
NIP. 197607132009021002

Palembang, 6 April 2026
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset


Rommy Suhaimy, S.Kom., M.Si
Penata Tk I (III.d)
NIP. 198601312011011004

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2026

Bagian Perencanaan dan Data Informasi Sekretariat BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	%	100	18	18	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target, laporan penyusunan disesuikan dengan batas waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan	Bagian Perencanaan dan Data Informasi sampai dengan Triwulan I dengan output yang telah dihasilkan sebanyak 8 Laporan yaitu Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Buku DPA Ta. 2026, Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan per bulan, Laporan LPPD, LKPJ (Realisasi dan Tanggapan DPRD), Laporan Renaksi, Laporan Perjanjian Kinerja, dan Peta Risiko) dengan persentase capaian sebesar 18%

Sekretaris Badan,


Ferri Yanuar, S.K.M.,M.Kes
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197607132009021002

Palembang, 6 April 2026
Kasubbag. Perencanaan dan Data Informasi,


Lanri Stia Agustoni,
Pembina (IV.a)
NIP. 198208082007011016

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2026

Bagian Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Terlaksananya Kualitas Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	%	25,96	26,14	100,69	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target, penyusunan Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD Adanya kewajiban hukum bagi daerah untuk mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru paling tinggi 30% dari total APBD. Ketentuan ini "memaksa" daerah untuk mengevaluasi kembali struktur belanja mereka agar tidak terkena sanksi penundaan dana Transfer ke Daerah (TKD).	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD terealisasi sebesar 26,14%. Hal ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD, Belanja Pegawai daerah termasuk didalamnya ASN, Kepala Daerah dan DPRD. Belanja Pegawai Daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
2.	Terlaksananya Kualitas Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD dan Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	%	36,60	27,52	75,19	Kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian Belanja Infrastruktur Proses pengadaan barang dan jasa seringkali baru dimulai di pertengahan tahun. Keterlambatan tender ini mengakibatkan pengerjaan fisik tidak selesai tepat waktu (silpa).	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur dengan capaian 27,52 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 36,60%. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan terus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun 2025 paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah diundangkan. Terkait pemenuhan Belanja Mandatory Spending, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan:

							* Meningkatkan kualitas mengelola keuangan belanja daerah dengan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai penggunaan dana publik dan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan terkait keuangan daerah dipertanggungjawabkan; * Melakukan evaluasi sub kegiatan dalam APBD yang mendukung pelaksanaan mandatory spending seperti mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang mendukung kesetaraan gender
--	--	--	--	--	--	--	--

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Palembang, 6 April 2026
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Dearah



H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 198208162001121004



Fetri Aswanti
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197702022000032003

TRIWULAN I TAHUN 2026

Sub Bagian Anggaran II Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang Tepat Waktu dalam pemenuhan Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta Belanja Mandatory Spending	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang Tepat Waktu dalam Pemenuhan Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta Belanja Mandatory Spending	%	100	20	20,00	Kendala Perencanaan Anggaran Daerah yang Tepat Waktu dalam Pemenuhan Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta Belanja Mandatory Spending sering terjadi Masalah konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD), tahunan (RKPD), dan dokumen penganggaran (KUA-PPAS).	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang Tepat Waktu dalam Pemenuhan Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta Belanja Mandatory Spending untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus mengupayakan pemenuhan alokasi minimal 20% pendidikan, 10% kesehatan, serta infrastruktur pelayanan publik minimal 40% terpenuhi sesuai undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah diundangkan. Terkait pemenuhan Belanja Mandatory Spending, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan:
								* Meningkatkan kualitas mengelola keuangan belanja daerah dengan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai penggunaan dana publik dan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan terkait keuangan daerah dipertanggungjawabkan;

									* Melakukan evaluasi sun kegiatan dalam APBD yang mendukung pelaksanaan mandatory spending seperti mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang mendukung kesetaraan gender
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Dearah

Fetri Aswanti

Fetri Aswanti
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 1977020220000032003

Palembang, 6 April 2026
Kasubbid Anggaran II

Angga Ariansyah

Angga Ariansyah, S.Si., M.A.B
Pembina (IV/a)
NIP. 197812312009031003

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2026

Sub Bagian Anggaran I Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Terbinanya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Keuangan Organisasi	Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibina Pengelolaaan Keuangannya	%	100	10	10,00	Kendala Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kota Perubahan APBD maupun APBD Adanya tarik-ulur kepentingan antara fraksi di DPRD atau antara eksekutif dan legislatif sering memperlama proses pembahasan. Dominasi faktor politik dibandingkan data empiris membuat pembahasan memakan waktu lebih lama.	Persentase Dokumen Evaluasi Perencanaan Anggaran Daerah yang Tepat Waktu dalam Pemenuhan Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta Belanja Mandatory Spending untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus mengupayakan pembinaan kepada Kabupaten/Kota terutama untuk pemenuhan alokasi minimal 20% pendidikan, 10% kesehatan, serta infrastruktur pelayanan publik minimal 40% terpenuhi sesuai undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah diundangkan. Terkait Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibina Pengelolaan Keuangannya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan: * Pengawasan Urusan Konkuren: Melakukan reviu dan monitoring terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah agar sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). * Koordinasi Tugas Pembantuan: Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas pembantuan yang diberikan pusat ke kabupaten/kota.

									* Pendampingan Pengelolaan Keuangan: Seperti yang dilakukan oleh BPKAD Provinsi Banten melalui Rapat Koordinasi rutin untuk memastikan akuntabilitas aset dan anggaran daerah.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Dearah

Fetri Aswanti

Fetri Aswanti
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197702022000032003

Palembang, 6 April 2026
Kasubbid Anggaran I

Febi Maharani

Febi Maharani, SE., M. Si., Ak, CA
Pembina (IV/a)
NIP. 198502142009022004

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2026

Sub Bagian Anggaran III Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang Tepat Waktu dalam pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan dan Pemerintahan Pilihan Belanja serta Mandatory Spending	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang Tepat Waktu dalam Pemenuhan Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pilihan serta Belanja Mandatory Spending	%	100	20	20,00	Kendala Perencanaan Anggaran Daerah yang Tepat Waktu dalam Pemenuhan Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta Belanja Mandatory Spending sering terjadi tarik-ulur kepentingan antara eksekutif dan legislatif (DPRD) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD.	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang Tepat Waktu dalam Pemenuhan Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta Belanja Mandatory Spending untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus mengupayakan pemenuhan alokasi minimal 20% pendidikan, 10% kesehatan, serta infrastruktur pelayanan publik minimal 40% terpenuhi sesuai undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah diundangkan. Terkait pemenuhan Belanja Mandatory Spending, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan: * Meningkatkan kualitas mengelola keuangan belanja daerah dengan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai penggunaan dana publik dan memastikan bahwa setiap keputusan

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2026

Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
		Persentase Penambahan Nilai	%	5	1	20	Faktor Pendorong Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap : - Adanya komitmen kuat dari kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dan pimpinan daerah untuk menyajikan laporan tepat waktu sebagai bentuk transparansi dan mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). - Implementasi SIPD yang terintegrasi mempermudah penginputan, konsolidasi, dan pengolahan data keuangan secara real-time, yang pada akhirnya mempercepat penyusunan laporan barang milik daerah. - Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) - Adanya jadwal internal yang rinci (timeline) untuk setiap tahapan, mulai dari rekonsiliasi BMD dalam rangka Penyusunan Laporan BMD hingga finalisasi laporan, membantu tim bekerja secara terstruktur.	Penyusunan Laporan BMD yang disusun merupakan Laporan BMD Tahun 2025 (Unaudited)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset Daerah							
	Aset Management		%	100	30	30	- Tidak ada kendala dalam pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah, antara lain dalam Penyusunan RKBMd, Pengawasan BMD dan Penertiban/Pengamanan BMD - Pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi BMD Tahunan dan Semesteran dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dalam pencapaian target, penyusunan laporan disesuaikan dengan batas waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan - Pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD dan Pemanfaatan BMD berjalan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang berlaku	Bagian Pengelolaan BMD sampai dengan Triwulan I dengan output yang telah dihasilkan Laporan yaitu Kerjasama dengan Kejat Sumsei (dalam hal Pengamanan Aset), BPN Kota Palembang (dalam hal percepatan sertifikasi tanah milik Pemprov. Sumsei), DJKN (dalam hal penilaian BMD Pemprov. Sumsei dan SK Gubernur yang telah terbit diantaranya terkait Hibah, Sewa Menyewa, Pinjam Pakai, SK Gubernur Pejabat Penatausahaan dan Pengurus Barang BMD dan Penghapusan BMD dengan persentase capaian sebesar 30%

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumsei,


H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 198208162001121004

Palembang, 6 April 2026
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah


Dante Rama Surya, SE., MM., CGAA
Pembina /IV/a
NIP. 197808102011011002

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2026

Sub Bidang Penatausahaan BMD BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah, Inventarisasi, dan laporan Belanja Modal yang Akuntabel	- Persentase Terwujudnya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	100	Aplikasi SIPD E-BMD terdapat data yang mengalami Kendala	Laporan Keuangan BMD dan CALK <i>Unaudited</i>
			%	100	3	7,5		Dokumen Penghapusan yang telah selesai sebanyak 3 OPD
		- Persentase Dokumen Inventarisasi Barang Milik daerah yang Akuntabel	%	100	-	-		Kegiatan Inventarisasi BMD belum dilaksanakan
		- Persentase Penertiban dan laporan Belanja Modal yang Akuntabel	%	100	29	75		SK Penetapan Status Belanja Modal yang telah selesai sebanyak 29 OPD

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Dante Rama Surya, SE., MM, CGAA
Pembina /IV.a
NIP. 197808102011011002

Palembang, 6 April 2026
Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD,

Alen Agustin, SE., M. Si
Pembina /IV.a
NIP. 198008212009012004

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2026

Subbid. Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Terwujudnya Dokumen Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Persentase Terwujudnya Dokumen Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	%	60	20	33,33	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian target, penyusunan laporan disesuaikan dengan batas waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan	Subbid Pemanfaatan Barang Milik Daerah sampai dengan Triwulan I dengan output yang telah dihasilkan sebanyak 20 Laporan yaitu dengan persentase capaian sebesar 33%

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Dante Rama Surya, SE., MM, CGAA
Pembina /IV.a
NIP. 197808102011011002

Palembang, 6 April 2026
Kasubag. Pemanfaatan BMD

Ade Kuniawan, S.STP., M. A. P
Penata Tingkat III.d
NIP. 199211082016091001

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2026

Subbid. Perencanaan dan Pengawasan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, Penertiban dan Pengawasan dan Pengendalian BMD yang akuntabel	1. Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	%	100	12,5	12,50	tidak ada kendala, karena periode pengajuan RKBMD antara April sampai dengan Juni	
		2. Persentase Tersusunnya Dokumen Penertiban Barang Milik Daerah	%	100	25	25,00	proses penertiban memerlukan kerja Tim dan proses litigasi memerlukan waktu yang cukup lama	
		3. Persentase Tersusunnya Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	%	100	0	0,00	kendala, belum terbentuknya Tim Pengawasan BMD yang telah dilakukan kontrak perkatan pemanfaatan	

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Dante Rama Surya, SE., MM, CGAA
Pembina /IV.a
NIP. 197808102011011002

Palembang, 6 April 2026
Kasubbid. Perencanaan dan Pengawasan BMD

Ahadim Effendi, S.H
Penata Tingkat I/III.d
NIP. 197802051997031001

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2026

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	(Tepat Waktu)	Laporan Keuangan yang disusun merupakan Laporan Keuangan Tahun 2025 (Unaudited)
							8	
							Faktor Pendorong Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu : - Adanya komitmen kuat dari kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dan pimpinan daerah untuk menyajikan laporan tepat waktu sebagai bentuk transparansi dan mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). - Implementasi SIPD yang terintegrasi mempermudah penginputan, konsolidasi, dan pengolahan data keuangan secara real-time, yang pada akhirnya mempercepat penyusunan laporan keuangan. - Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) - Adanya jadwal internal yang rinci (timeline) untuk setiap tahapan, mulai dari rekonsiliasi data hingga finalisasi laporan, membantu tim bekerja secara terstruktur.	

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumsel,

H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 198208162001121004

Palembang, 6 April 2026
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah,

H. Yune Rosalaini, SE., M. Si, CGCAE
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 197406231995032002

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2026

Sub Bidang Akuntansi II (Belanja)

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1	Terbinanya Pemerintah Kabupaten/ Kota tentang pengelolaan keuangan daerah	Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diina pengelolaan keuangannya	%	100	10	10	Belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target.	Sub Bidang Akuntansi II (Belanja) sampai dengan Triwulan I telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD dengan persentase capaian sebesar 10%.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah,


H. Yune Rosalaini, SE., M.Si., CGCAE
Pembina TK I (IV.b)
NIP. 197406231995032002

Palembang, 6 April 2026
Kepala Sub Bidang Akuntansi II (Belanja)


Yulidah, SE., Ak., M.Si
Pembina (IV.a)
NIP. 197106232005022004

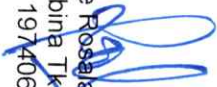
LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2026

Subbidang Akuntansi III Bidang Akuntansi dan PKD BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Tertaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP	Persentase Tertaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP	%	100	20	20	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target, Laporan penyusunan disesuikan dengan batas waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan	Subbidang Akuntansi III sampai dengan Triwulan I telah menghasilkan output yaitu : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA 2025 Unaudited dengan persentase capaian sebesar 20%

Kepala Bidang Akuntansi dan PKD,

Palembang, 6 April 2026
Kassubbid. Akuntansi III,


Yune Roselajini, S.E., M.Si, CGCAE
Pembina Tk1 (IV.b)
NIP. 197406231995032002


Riyatno, S.E., M.Ak., Ak. CA
Pembina (IV.a)
NIP. 197806112009021003

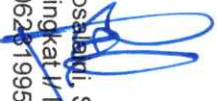
LAPORAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2026

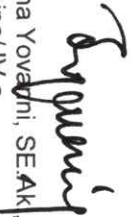
Sub Bidang Akuntansi I Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumsel

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Faktor Penghambat/Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terlaksananya Penyusunan APBD Pertanggungjawaban yang Tepat Waktu	Persentase terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	%	100	25	25	- Adanya komitmen kuat dari kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dan pimpinan daerah untuk menyajikan laporan tepat waktu sebagai bentuk transparansi dan mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). - Implementasi SIPD yang terintegrasi mempermudah penginputan, konsolidasi, dan pengolahan data keuangan secara real-time, yang pada akhirnya mempercepat penyusunan laporan keuangan. - Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) - Adanya jadwal internal yang rinci (timeline) untuk setiap tahapan, mulai dari rekonsiliasi data hingga finalisasi laporan, membantu tim bekerja secara terstruktur.	Sampai dengan Triwulan I telah menghasilkan output BA Rekon Pajak Daerah, BA Rekon Retribusi Daerah, BA Rekon Lipad dan BA Rekon Transfer dengan persentase capaian 25%.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah,

Palembang, 6 April 2026
Kepala Sub Bidang Akuntansi I,


H. Yune Rosaladi, SE, M.Si, CGCAE
Pembina Tingkat IV/b
NIP. 197406261995032002


Silvana Yovani, SE, Ak, M.Si
Pembina/IV.a
NIP. 197704022010012011

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
 TRIWULAN I TAHUN 2026

Bagian Perbendaharaan Daerah

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA	%	2,50	-	-		8
					SILPA Tahun 2026 akan diperoleh setelah berakhirnya tahun anggaran.			Untuk Realisasi SILPA Tahun 2025 (LRA Unaudited sebesar Rp208.951.815.767,75 atau sebesar 1,86% dari Total Belanja Daerah sebesar Rp11.237.619.654.098,00, SILPA tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,93% jika dibandingkan dengan Realisasi SILPA Tahun 2024 sebesar Rp108.494.651.207,36 atau 0,93% dari Total Belanja sebesar Rp11.613.884.803.146,00. Hal ini disebabkan karena tidak optimalnya serapan anggaran atau realisasi belanja lebih rendah dari pagu yang ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengelola SILPA antara lain : - Mengelola arus kas agar SILPA yang tersimpan di kas daerah dapat digunakan secara optimal, terutama untuk kebutuhan mendesak seperti pembayaran gaji pegawai, listrik, dan air di awal tahun. - Percepatan Proses Realisasi Anggaran. Mempercepat penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) agar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dapat segera melakukan pencairan anggaran di triwulan I, sehingga mencegah menumpuknya SILPA di akhir tahun.

Kepala-Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumsel,



H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
 Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP. 198208162001121004

Palembang, 6 April 2026
 Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah,

Febriany, S.E., M. Si., CGAA
 Pembina /IV.a
 NIP. 197602262007012006

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2026

Sub Bidang Perbendaharaan I BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Persentase Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah secara Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Berbasis Digitalisasi	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah secara Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Berbasis Digitalisasi	%	100	24	24	OPD terkadang tidak menjelaskan pencatatan kegiatan menggunakan sumber daya apa.	-

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah,

Febriany, S.E., M. Si., CGAA
Pembina /IV.a
NIP. 197602262007012006

Palembang, 6 April 2026
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I

Arlini Sutisno, S.E., M.M
Pembina /IV.a
NIP. 198508042009032005

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2026

Sub Bidang Perbendaharaan II BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Persentase Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah secara Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Berbasis Digitalisasi	Persentase Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah secara Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Berbasis Digitalisasi	%	100	25	25	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target	Realisasi Belanja Daerah mencapai 9,5%

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah,

Febriany, S.E., M. Si., CGAA
Pembina /IV.a
NIP. 197602262007012006

Palembang, 6 April 2026
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II

M. Rasyid Ridho, S.T., SP., M.M
Pembina /IV.a
NIP. 198106082010011012

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2026

Sub Bidang Perbendaharaan III BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	8
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah secara Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Berbasis Digitalisasi	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah secara Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Berbasis Digitalisasi	%	100	10	10	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target.	- Realisasi atas Pemotongan SP2D atas Kas Triwulan I Tahun 2026 masih berjalan sesuai dengan rencana - Realisasi Belanja Daerah mencapai 9,5%

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah,

Febriany, S.E., M. Si., CGAA
Pembina /IV.a
NIP. 197602262007012006

Palembang, 6 April 2026
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan III

Andri Geromiko, S.E., M.M
Pembina /IV.a
NIP. 198504282009031006